

**GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA
“SIADADI” KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN**

**DEMOCRATIC LEADERSHIP STYLE OF THE VILLAGE HEAD
OF “SIADADI” KENDURUAN DISTRICT, TUBAN REGENCY**

Sepvika Atita Sari¹, Yuni Lestari²

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: sepvika.21062@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: yunilestari@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa “Siadadi” Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki karakter yang dihormati dan disegani oleh bawahannya, serta melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Namun, ditemukan bahwa gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan belum berjalan secara optimal. Proses pengambilan keputusan cenderung lambat karena menunggu masukan dari bawahan, dan kurangnya ketegasan menyebabkan kedisiplinan perangkat desa menurun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada pendelegasian tanggung jawab, keaktifan, pengambilan keputusan, dan empati. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendelegasian tanggung jawab belum terstruktur dengan baik, keaktifan kepala desa masih simbolik, pengambilan keputusan melalui musyawarah desa belum melibatkan seluruh warga, dan empati yang ditunjukkan bersifat situasional. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan demokratis kepala desa perlu ditingkatkan terutama dalam hal komunikasi langsung, konsistensi empati, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan desa.

Kata Kunci: Kepemimpinan Demokratis, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat

Abstract

This study aims to describe the democratic leadership style of the Village Head of "Siadadi" Kenduruan District, Tuban Regency. The village head as a leader has a character that is respected and esteemed by his subordinates, and involves members in decision making. However, it was found that the democratic leadership style applied has not run optimally. The decision-making process tends to be slow because it waits for input from subordinates, and the lack of assertiveness causes the discipline of village officials to decline. This study uses a descriptive qualitative method with a focus on delegation of responsibility, activeness, decision making, and empathy. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation. The results of the study showed that the delegation of responsibility was not well structured, the activeness of the village head was still symbolic, decision making through village deliberations did not involve all residents, and the empathy shown was situational. In conclusion, the democratic leadership style of the village head needs to be improved, especially in terms of direct communication, consistency of empathy, and active involvement of the community in village government.

Keywords: Democratic Leadership, Village Government, Community Participation

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan aspek fundamental dalam setiap bentuk organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit, termasuk organisasi pemerintahan. Dalam konteks organisasi pemerintahan, keberadaan pemimpin yang efektif sangat diperlukan guna mengarahkan, mengelola, dan mengembangkan potensi organisasi serta anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Irwanto dan Riyadi (2023), kepemimpinan dibutuhkan dalam semua tipe organisasi, bukan hanya di sektor swasta, tetapi juga pada organisasi pemerintahan. Kepemimpinan tidak hanya sekadar posisi struktural, namun lebih kepada pengaruh yang diberikan untuk menggerakkan anggota organisasi mencapai sasaran secara produktif dan efektif. Adolph (2020) menegaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan individu yang digunakan untuk memengaruhi norma perilaku manusia dalam ruang lingkup organisasi, sehingga dapat menciptakan perilaku yang sesuai dengan harapan pemimpin. Dalam pandangan Hasibuan yang dikutip oleh Adolph (2020), kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin memengaruhi perilaku bawahan agar mampu bekerja secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memotivasi, mengarahkan, dan membina anggotanya secara positif.

Sejalan dengan itu, (Akbar, 2021) menyebutkan bahwa proses kepemimpinan membawa dampak besar terhadap keberhasilan seorang pemimpin, khususnya dalam memengaruhi kepribadian dan motivasi bawahannya. Kepemimpinan tidak hanya tentang memberikan perintah, tetapi lebih kepada bagaimana seorang pemimpin mampu menanamkan sikap positif, memberikan arahan, serta menciptakan suasana kerja yang mendukung kemajuan bersama. Oleh sebab itu, pemimpin dituntut untuk mampu mengelola dinamika karakter dan latar belakang anggota timnya agar tercipta sinergi dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses pelaksanaannya, kepemimpinan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan hambatan sering kali muncul, baik dari internal organisasi maupun dari lingkungan eksternal. Hardika Senny et al. (2020) menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan seni dalam memengaruhi perilaku individu atau kelompok untuk bertindak dalam arah yang diinginkan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan memahami karakter orang lain, serta kepekaan dalam menghadapi berbagai situasi organisasi.

Gaya kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pemimpin. Irfa et al. (2023) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin mengelola organisasi dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi organisasi, budaya kerja, dan karakter bawahan. Menambahkan bahwa efektivitas seorang pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya dalam memotivasi anggota, memberikan arahan yang tepat, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Dalam organisasi pemerintahan desa, gaya kepemimpinan demokratis sering kali dianggap paling relevan karena menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan demokratis menurut Utari dan Hadi (2020) adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam pembuatan

kebijakan. Pemimpin tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan mengakomodasi pendapat dan kritik dari bawahannya. Gaya ini juga dikenal sebagai gaya kepemimpinan partisipatif karena pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendorong kerja sama dan sinergi dalam organisasi. Kepemimpinan demokratis juga memberi ruang kepada bawahan yang memiliki kompetensi untuk bertanggung jawab atas tugas tertentu, serta memberikan umpan balik yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu. Irfa et al. (2023) menekankan bahwa pemimpin yang menerapkan gaya ini tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengembangkan potensi bawahannya melalui pelatihan, kritik yang membangun, serta pujian yang proporsional. Dengan demikian, kepemimpinan demokratis mendorong suasana kerja yang terbuka dan mendorong pertumbuhan personal.

Konteks pemerintahan desa, gaya kepemimpinan demokratis menjadi sangat penting mengingat desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kepala desa dituntut untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya administratif, tetapi juga komunikatif dan partisipatif. Menurut (Bender, 2016) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 (Indonesia, 2024), kepala desa memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, gaya kepemimpinan yang tepat sangat diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut secara efektif.

Desa “Siadadi”, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, merupakan salah satu desa yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Desa ini terdiri atas 5 dusun, 43 RT, dan 10 RW, dengan jumlah penduduk sebanyak 6.355 jiwa. Kepala Desa “Siadadi” telah menjabat selama dua periode dan dikenal menerapkan gaya kepemimpinan yang cenderung demokratis. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat, ditemukan bahwa kepala desa sering melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan dan memberi ruang diskusi dalam menyelesaikan persoalan. Namun, pendekatan yang terlalu terbuka ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti lambannya proses pengambilan keputusan dan kurangnya ketegasan dalam menerapkan aturan kerja.

Permasalahan lain yang ditemukan meliputi keluhan masyarakat terhadap keterlambatan pelayanan karena beberapa pegawai tidak hadir tepat waktu, serta kurangnya keterlibatan langsung kepala desa dalam kegiatan masyarakat. Beberapa warga mengungkapkan bahwa interaksi langsung lebih banyak dilakukan oleh bawahan kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan demokratis telah diterapkan, masih terdapat kekurangan dalam implementasi yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Fenomena ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana gaya kepemimpinan demokratis diterapkan oleh Kepala Desa “Siadadi”, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan desa dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi kepala desa dan perangkat desa dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih responsif,

partisipatif, dan efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama penelitian yang ingin menggali secara mendalam bagaimana gaya kepemimpinan demokratis diterapkan oleh Kepala Desa “Siadadi” Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap suatu fenomena sosial yang kompleks, terutama dalam konteks hubungan antar individu dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian, yakni peran kepala desa dalam memimpin dan mengambil keputusan bersama masyarakat desa. Fokus penelitian ini diarahkan pada penerapan gaya kepemimpinan demokratis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lippitt dan White dalam (Andani et al., 2024). Fokus ini mencakup empat dimensi utama, yaitu pendelegasian tanggung jawab, keaktifan, pengambilan keputusan, dan empati.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa “Siadadi”, yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 342, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini terdiri atas dua jenis, yaitu instrumen utama dan instrumen bantu. Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan dan interpretasi data secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan dan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai implementasi gaya kepemimpinan demokratis oleh Kepala Desa “Siadadi” dalam mengelola pemerintahan desa serta hubungannya dengan masyarakat. Maka untuk mengetahui penelitian lebih lanjut, fokus penelitian mengacu pada teori Lippitt dan White dalam (Andani et al., 2024) terdiri dari 4 indikator yaitu:

1. Pendelegasian Tanggung Jawab
2. Keaktifan
3. Pengambilan Keputusan
4. Empati

Hasil dan Pembahasan

Gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan dimana pemimpin akan melibatkan anggota tim atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan demokratis pemimpin berusaha memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota untuk, menyampaikan pendapat, ide dan masukan sebelum keputusan akhir meskipun keputusan akhir akan jatuh di pemimpin. Pada penelitian ini menggunakan teori yang diungkapkan oleh Lippitt dan White dalam (Andani et al., 2024) mengenai empat indikator gaya kepemimpinan demokratis yaitu pendelegasian tugas tanggung

jawab, keaktifan, pengambilan keputusan dan empati.

1. Pendelegasian Tanggung Jawab

Praktik kepemimpinan di Desa “Siadadi”, terlihat adanya upaya penerapan gaya kepemimpinan demokratis, terutama dalam aspek pendelegasian tugas kepada perangkat desa. Kepala desa menunjukkan sikap terbuka dalam membagi tanggung jawab, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat. Hal ini mengindikasikan adanya kepercayaan kepala desa terhadap kapasitas dan kapabilitas bawahannya, serta usaha untuk menjaga keseimbangan kerja di lingkungan internal pemerintahan desa. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik kepemimpinan demokratis yang menekankan partisipasi, musyawarah, dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas. Namun demikian, ketika pengamatan diperluas pada relasi antara kepala desa dengan masyarakat, ditemukan adanya celah dalam penerapan prinsip demokratis tersebut.

Pendelegasian tugas kepada masyarakat tampak belum terorganisir secara sistematis. Sebagai contoh, kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, seperti kerja bakti, justru diinisiasi oleh masyarakat sendiri tanpa adanya agenda resmi dari pemerintah desa. Meskipun hal ini menunjukkan kesadaran sosial warga yang tinggi, absennya peran aktif kepala desa dalam merancang dan mengarahkan kegiatan-kegiatan tersebut menandakan kurang optimalnya pendelegasian kepada elemen masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat belum benar-benar dilibatkan secara strategis dalam pembangunan desa, melainkan lebih berperan sebagai pelaksana inisiatif sendiri-sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kepala desa “Siadadi” telah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis secara cukup efektif dalam lingkup internal perangkat desa. Namun, gaya tersebut belum meluas hingga ke tingkat masyarakat. Ketiadaan perencanaan, kurangnya program pemberdayaan masyarakat, serta minimnya komunikasi strategis antara pemerintah desa dan warga menunjukkan bahwa pendelegasian masih bersifat terbatas dan belum menjadi bagian dari proses transformasi sosial di desa.

2. Keaktifan

Kepala desa dalam menerapkan gaya kepemimpinan demokratis di Desa “Siadadi”, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, diketahui bahwa kepala desa cenderung aktif dalam aspek administratif. Ia memberikan arahan dan instruksi melalui perangkat desa yang kemudian meneruskannya kepada masyarakat. Meskipun secara teknis ia menjalankan tugas pemerintahan, interaksi langsung dengan warga tampak sangat terbatas. Kepala desa lebih sering menggunakan perangkatnya sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi dan kebijakan. Dalam kegiatan sosial atau seremonial seperti pengajian, peringatan hari besar nasional, dan perlombaan antar dusun, kepala desa memang terlihat hadir. Namun kehadirannya lebih bersifat formal, seperti membuka atau menutup acara, tanpa keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung.

Warga merasakan bahwa kepala desa jarang hadir dalam kegiatan nonformal seperti ronda malam, kerja bakti, arisan warga, atau forum musyawarah lingkungan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kepala desa kurang membaur dan tidak terlibat langsung dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kepala desa belum sepenuhnya menerapkan gaya kepemimpinan demokratis secara utuh, khususnya dalam aspek keaktifan sosial dan keterlibatan langsung di tengah masyarakat. Ia masih perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas interaksi sosial, membangun komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif, serta menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan warga, bukan hanya sebagai figur administratif. Hal ini penting agar kepemimpinannya dapat diterima, dipercaya, dan mendatangkan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan desa.

3. Pengambilan Keputusan

Dimensi pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam kepemimpinan desa, karena menentukan arah kebijakan dan keberhasilan program pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, serta masyarakat Desa “Siadadi”, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan melalui pendekatan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, kepala dusun, dan ketua RT dari masing-masing wilayah. Proses musyawarah desa (Musdes) menjadi forum utama dalam pengambilan keputusan, yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Namun, partisipasi masyarakat dalam forum ini masih terbatas, hanya diwakili oleh unsur-unsur tertentu, seperti kepala dusun, RT, RW, dan tokoh masyarakat.

Keterlibatan warga secara langsung masih sangat minim, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa warga yang menyatakan bahwa informasi tentang rapat seringkali tidak tersebar secara merata dan undangan diberikan secara mendadak. Akibatnya, banyak warga tidak mengetahui atau tidak sempat menghadiri rapat. Kepala desa dinilai menjalankan kepemimpinan yang demokratis, dengan memberikan ruang diskusi bagi masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi. Kesenjangan antara pendekatan formal dan praktik aktual menyoroti perlunya peningkatan dalam aspek inklusivitas, transparansi, dan efektivitas komunikasi desa. Penguatan sistem komunikasi dan penjadwalan yang lebih terstruktur serta sosialisasi yang merata menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan demokratis. Keterlibatan masyarakat yang lebih luas tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap kepemimpinan kepala desa.

4. Empati

Empati merupakan elemen penting dalam kepemimpinan demokratis, yaitu kemampuan pemimpin untuk merasakan dan memahami kondisi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empati Kepala Desa “Siadadi” belum sepenuhnya merata dan konsisten dirasakan oleh warga. Kepala desa cenderung menunjukkan empati secara situasional, seperti saat terjadi musibah atau dalam kegiatan besar, namun keterlibatan sosialnya masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan

masyarakat secara rutin. Sebaliknya, kepala dusun justru menunjukkan empati yang lebih nyata dan konsisten. Ia lebih sering hadir langsung saat warga membutuhkan, termasuk di luar jam kerja formal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan partisipatif dan pelayanan publik lebih terlihat dalam peran kepala dusun dibanding kepala desa. terdapat beberapa temuan penting. Sebagian warga menyatakan bahwa mereka merasa kurang diperhatikan oleh kepala desa, terutama dalam aspek pelayanan dan keterlibatan sosial sehari-hari. Warga cenderung merasakan empati lebih dari kepala dusun dibanding dari kepala desa. Kekecewaan juga muncul ketika pelayanan administratif terganggu karena ketidakhadiran seluruh perangkat desa tanpa pemberitahuan, seperti yang terjadi saat kunjungan ke kecamatan. Hal ini menandakan adanya kurangnya sistem pelayanan yang responsif dan koordinatif, yang berdampak langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap empati pemerintah desa.

Penutup Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa “Siadadi” Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa penerapan kepemimpinan demokratis belum berjalan secara optimal. Hal ini ditinjau melalui empat indikator utama gaya kepemimpinan demokratis menurut Lippitt dan White dalam (Andani et al., 2024), yaitu pendelegasian tanggung jawab, keaktifan, pengambilan keputusan, dan empati.

1. Pendelegasian Tanggung Jawab

Ditemukan bahwa pemerintah desa belum mampu mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal melalui pemberdayaan yang terstruktur. Sebagian besar kegiatan kemasyarakatan masih bergantung pada inisiatif warga tanpa adanya arahan atau dukungan konkret dari pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokratis, seperti kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan inisiatif kolektif, belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik kepemimpinan kepala desa. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan struktur organisasi dan peningkatan kapasitas kepemimpinan agar pendelegasian tugas dapat berjalan secara efektif, terencana, dan berkesinambungan.

2. Keaktifan

Pemimpin menunjukkan bahwa kepala desa dan perangkat desa telah hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat. Namun demikian, keaktifan kepala desa dinilai masih bersifat simbolik dan seremonial semata, belum mencerminkan keterlibatan secara emosional, sosial, dan komunikatif yang intens dengan masyarakat. Kepala desa cenderung menyerahkan tugas-tugas komunikasi langsung kepada perangkat desa, sehingga menciptakan jarak antara pemimpin dengan warga. Dalam konteks kepemimpinan demokratis, hal ini menjadi tantangan karena kehadiran langsung dan interaksi emosional antara pemimpin dan masyarakat merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

3. Pengambilan Keputusan

Pelibatan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) menunjukkan

kecenderungan ke arah gaya kepemimpinan demokratis yang terbuka dan partisipatif. Kepala desa menunjukkan kemauan untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Namun, proses ini masih menghadapi kendala teknis seperti keterlambatan dalam penyampaian informasi serta tidak meratanya partisipasi warga. Beberapa kelompok masyarakat tidak terlibat secara langsung atau bahkan tidak mendapatkan akses informasi yang memadai. Oleh karena itu, meskipun terdapat upaya menuju proses pengambilan keputusan yang demokratis, masih diperlukan perbaikan dalam hal efisiensi penyampaian informasi, keterbukaan akses, dan pelibatan seluruh elemen masyarakat secara inklusif.

4. Empati

Ditemukan bahwa praktik kepemimpinan kepala desa menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dalam beberapa situasi, seperti menghadiri acara sosial atau memberikan bantuan kepada kelompok rentan. Namun demikian, bentuk empati yang ditunjukkan belum merata dan masih bersifat situasional. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa belum secara konsisten menerapkan pendekatan empatik dalam membangun relasi yang setara dan humanis dengan seluruh lapisan masyarakat. Empati yang lebih mendalam dan menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan kepemimpinan yang tidak hanya demokratis tetapi juga transformatif dan melayani.

Saran

1. Pendelegasian Tanggung Jawab

Pemerintah desa perlu meningkatkan peran aktif dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah dengan membentuk sistem pendelegasian yang lebih terstruktur, mencakup penjadwalan kegiatan, pembagian tugas yang jelas, dan pelibatan langsung warga dalam berbagai program desa. Pemerintah desa sebaiknya tidak hanya menunggu inisiatif dari masyarakat, tetapi juga menciptakan ide dan program yang bersifat inspiratif serta mendorong kreativitas warga. Hal ini bertujuan agar terbentuk budaya kolaboratif dan rasa tanggung jawab bersama dalam membangun desa.

2. Keaktifan

Perlu adanya peningkatan keaktifan kepala desa dan perangkat desa dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di lingkungan desa. Kepala desa diharapkan hadir tidak hanya pada acara besar atau seremonial, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan rutin masyarakat, guna membangun kedekatan emosional dan memperkuat kepercayaan publik. Selain itu, komunikasi dua arah antara kepala desa dan masyarakat harus diperkuat, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang efektif. Perangkat desa tetap memiliki peran penting sebagai penghubung administratif, namun tidak seharusnya menggantikan fungsi sosial dan komunikatif kepala desa dalam menjalin hubungan dengan warga.

3. Pengambilan Keputusan

Meskipun pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan telah dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), ruang partisipasi masih perlu diperluas. Kepala desa dapat menyediakan berbagai alternatif kanal partisipatif seperti kotak aspirasi, forum terbuka, atau konsultasi publik secara daring maupun luring. Hal ini penting agar seluruh warga, termasuk yang tidak dapat hadir secara langsung, tetap

memiliki akses untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan perlu dilakukan secara berkala dan transparan dengan melibatkan masyarakat, sebagai wujud akuntabilitas pemerintahan desa. Penyesuaian waktu pelaksanaan musyawarah juga penting untuk memastikan tidak mengganggu aktivitas utama warga, seperti bekerja atau bertani.

4. Empati

Empati dalam kepemimpinan, kepala desa perlu meningkatkan konsistensi dalam menunjukkan kepedulian sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Program-program sosial yang bersifat rutin, seperti kunjungan warga berkala, forum aspirasi terbuka, dan kegiatan sosial terpadu, perlu diadakan sebagai bentuk nyata empati dan kedekatan pemimpin terhadap warganya. Kepala desa juga diharapkan bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan perhatian, terutama terhadap kelompok rentan seperti lansia, warga miskin, dan penyandang disabilitas, tanpa mengabaikan kelompok lainnya. Kehadiran kepala desa secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan kepemimpinan yang manusiawi, melayani, dan inklusif.

Referensi

- Adolph, R. (2020). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Tata Kerja Pemerintah Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro*. 3(1), 1–23.
- Akbar, N. (2021). Tipe Dan Gaya Kepemimpinan Pendidikan Dan Dakwah. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 5(9), 9979–9985. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v5i9.1883>
- Andani, H., Renggani, F. P., Seftiansyah, R., & Sabila, Z. Y. (2024). *Indikator Keberhasilan Gaya Kepemimpinan Demokratis*. 3, 1932–1940.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Hardika Senny, M., Wijayaningsih, L., Kurniawan, M., & Kristen Satya Wacana, U. (2020). Penerapan Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Manajemen PAUD di Kecamatan Sidorejo Salatiga The Application of Transformational Leadership in Early Childhood Education Management in Sidorejo Salatiga Sub District. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 197–209.
- Indonesia, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan. Bpk.Go.Id*, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>

Irfa, P., Solicha, A., & Lestari, Y. (2023). *Gaya Kepemimpinan Demokratis Di Sekretariat Dprd Kota Surabaya Democratic Leadership Style In The Surabaya Legislative Council Secretariat. 1*, 341–350.

Irwanto, D., & Riyadi, S. (2023). Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada. *Soetomo Business Review, 4*, 6104.

Utari, S., & Hadi, M. M. (2020). Gaya Kepemimpinan Demokratis Perpustakaan Kota Yogyakarta (Studi Kasus). *Jurnal Pustaka Ilmiah, 6*(1), 994.
<https://doi.org/10.20961/jpi.v6i1.41095>